PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

Jl Gatot Subroto Komplek Terminal Dukuhsalam

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Gatot Subroto komplek Terminal Dukuhsalam Slawi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kab. Tegal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Slawi, 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tegal

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PERHUBUNGAN

Drs. AKHMAD UWES QORONI, MT
NIP. 19740621 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Gatot Subroto komplek Terminal Dukuhsalam Slawi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagai mana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi, 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tegal

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERHUBUNGAN

Dr. AKHMAD UWES QORONI, MT
NIP. 19740621 199302 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 2.042.958.135,- atau mencapai 90,20% (persen) dari anggaran Pendapatan-LRA sebesar Rp. 2.265.022.300,-.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 26.656.954.902,- atau mencapai 89,13% (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 29.907.386.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 62.843.568.685,50,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 4.146.064.930,- Aset Tetap sebesar Rp. 58.668.878.038,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 131.072.834,- dan Rp. 62.892.233.685,50,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 2.280.270.255,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 2.213.415.603,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO sebesar Rp. 66.854.652,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 21.042.982.805,-. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (18.762.712.550,75,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp 37.217.534.682,50,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. . (25.534.514.997,50,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 62.761.160.851,50,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.2. Basis Akuntansi

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual*direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan Tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN DAERAH

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal adalah sebagai berikut:

Akun	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	5=3/2	6
a. Pendapatan Retribusi Daerah	2.265.022.300,-	2.041.958.135,-	90,15	2.507.436.857
b. Lain-lain PAD yang Sah	0	1.000.000,-	100	0
Jumlah	2.265.022.300,-	2.042.958.135,-	90,20	2.507.436.857

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 2.042.958.135,- atau 90,20% dari anggarannya sebesar Rp. 2.265.022.300,- dan turun sebesar Rp. 464.478.722,- dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp. 2.507.436.857,-. Pendapatan Daerah terdiri atas :

a) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan daerah dari retribusi daerah TA 2020 Rp. 2.265.022.300,- terealisasi sebesar Rp. 2.041.958.135,- atau 90,15 %, dan turun sebesar Rp. 464.478.722,- dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp. 2.507.436.857,-. Pendapatan Daerah terdiri atas :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.265.022.300,-	2.042.958.135,-
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	664.500.000,-	509.211.000,-
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	0,-	0,-
Retribusi PKB – Mobil Penumpang – Jeep - LRA	0,-	0,-
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA	39.580.000,-	38.110.000,-
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus – LRA	40.760.000,-	41.730.000,-
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA	610.140.000,-	628.340.003,-
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA	438.720.000,-	440.390.000,-
Retribusi Pengolahan Limbah Cair – LRA	32.000.000,-	33.000.000,-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	233.430.000,-	199.421.132,-
Retribusi Terminal – LRA	125.453.000,-	80.478.000,-
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	80.439.300,-	71.278.000,-

B.2 BELANJA DAERAH

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal TA 2020 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab.Tegal adalah sebagai berikut :

No.	AKUN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1.	Belanja Pegawai	9.726.853.000,-	9.184.805.176,-	94,43	8.644.419.567,-
2.	Belanja Barang	13.451.465.000,-	11.994.081.819,-	89,17	5.188.475.126,-
3.	Belanja Modal	6.729.068.000,-	5.478.067.907,-	81,41	38.613.635.629,-
	JUMLAH	**29.907.386.000,-**	**26.656.954.902,-**	**89,13**	**52.446.530.322,-**

Realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp. **26.656.954.902,-** atau 90,59 % dari anggarannya sebesar Rp. **29.907.386.000,-** turun sebesar Rp. 25.789.575.420,- dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp. **52.446.530.322,-.**

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp. 9.184.805.176,- atau 94,43% dari anggarannya sebesar Rp. 9.726.853.000,-. Realisasi TA 2020 naik sebesar Rp. 1.082.433.433,- dibandingkan dengan realisasi TA. 2019 sebesar Rp. 8.644.419.567,- yang terdiri dari :

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
Gaji dan tunjangan PNS	3.673.433.000,-	3.502.958.967,-	96,30	3.795.740.064,-
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	112.100.000,-	62.046.209,-	55,35	98.602.003,-
Belanja Uang Lembur	128.480.000,-	76.685.000,-	59,69	58.307.500,-
Honorarium PNS	455.740.000,-	397.545.000,-	87,23	568.425.000,-
Honorarium Non PNS	5.357.100.000,-	5.145.570.000,-	96,01	4.123.345.000,-
JUMLAH	**9.726.853.000,-**	**9.184.805.176,-**	**94,43**	**8.644.419.567,-**

b) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA. 2020 sebesar Rp. 11.994.081.819,- atau 89,17 % dari anggaran sebesar Rp. 13.451.465.000,- naik sebesar Rp. 6.805.606.693,- dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp. 5.188.475.126,-.

c) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2020 sebesar Rp. 5.478.067.907,- atau 81,41 % dari anggaran sebesar Rp. 6.729.068.000,- naik sebesar Rp. 32.527.365.713,- dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp. 38.613.635.629,- yang terdiri dari:

No.	AKUN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1.	Peralatan dan Mesin	136.000.000,-	133.794.300,-	98,38	277.948.804,-
2.	Gedung dan bangunan	1.543.068.000,-	1.511.334.474,-	97,94	6.315.141.342,-
3.	Jalan, Irigasi dan jaringan	5.050.000.000,-	3.832.939.133,-	75,90	32.020.545.483,-
	JUMLAH	**6.729.068.000,-**	**5.478.067.907,-**	**81,41**	**38.613.635.629,-**

d) SURPLUS (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal sebesar Rp. 24.613.996.767,- dari yang dianggarkan defisit sebesar Rp. 27.642.363.700,-.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

a) Aset Lancar

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	**Rp. 0 ,00**	**Rp.0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Kab.Tegal yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
2. Kas di Bendahara Penerimaan	**Rp. 267.000,00**	**Rp. 48.665.000,00**

Kas di bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kab.Tegal merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 267.000,-.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
c. Piutang	**Rp. 768.420.425,00**	**Rp. 657.962.957,00**

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang Dinas Perhubungan Tahun 2020 sebesar Rp. 768.420.425,- terdiri dari Retribusi pengolahan limbah cair Th. 2018, 2019 dan Th. 2020 sebesar Rp. 13.400.000,-. Retribusi tempat khusus parkir Th. 2018 dan Th. 2020 sebesar Rp. 16.700.000,-. Retribusi parkir tepi jalan Th. 2017, 2018 dan Th. 2020 sebesar Rp. 478.425.000,-. Piutang PKD Th. 2017, 2018, 2019 dan Th. 2020 sebesar Rp. 258.715.919,-. dan piutang denda retribusi Th. 2017 sebesar Rp. 1.179.506,-.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
d. Penyisihan Piutang	**Rp.(595.405.296,00)**	**Rp. (390.215.048,5)**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. **(595.405.296,00)**

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
d. Persediaan	**Rp. 4.026.032.860,00**	**Rp. 463.446.075,00**

Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, barang cetakan, Karcis, Buku uji dan Plat uji kendaraan, traffic cone, Lampu penerangan jalan

umum, peralatan kebersihan, dan komponen instalasi listrik. Persediaan per 31 Desember tahun 2020 sebesar Rp. 4.026.032.860,- sedangkan persedian per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 463.446.075,-. Persediaan terdiri dari :

Persediaan	31 Desember 2019 (Rp.)	31 Desember 2018 (Rp.)
a. ATK	5.000.270,-	3.904.175,-
b. Buku Uji dan Plat Uji	349.389.500,-	121.941.710,-
c. Karcis	44.290.840,-	41.060.250,-
d. Barang cetakan kantor	7.280.020,-	4.760.800,-
e. Traffic cone, Rambu Portable dan Water Barrier	173.480.230,-	75.858.640,-
f. Barang LPJU (Lampu)	3.444.732.500,-	214.368.000,-
g. Alat kebersihan	148.600,-	238.100,-
h. Alat listrik	1.710.900,-	1.314.400,-
Jumlah Persediaan	**4.026.032.860**	**463.446.075,-**

2. **Aset Tetap**	**31 Desember 2020**	**31 Desember 2019**
	Rp. 58.668.878.038,00	**Rp. 56.273.490.559,00**

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemkab Tegal. yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
a. Tanah	2.659.060.000,00	0,00	0,00	2.659.060.000,00
b. Peralatan dan Mesin	20.729.341.579,00	1.003.958.714,00	0,00	19.725.382.865,00
c. Gedung dan bangunan	46.636.201.803,00	679.154.970,00	0,00	45.957.046.833,00
d.Jalan, Irigasi & Jaringan	14.612.677.426,00	4.014549.223,00	0,00	10.598.128.203,00
e. Aset Tetap Lainnya	340.395.000,00	0,00	0,00	340.395.000,-
f.Akumulasi Penyusutan	(26.308.797.770,00)	(3.302.275.428,00)	0,00	(23.006.522.342,00)
Jumlah Aset Tetap	**58.668.878.038,00**	**2.395.387.480,00**	**0,00**	**56.273.490.559,00**

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.659.060.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2019.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 20.729.341.579,00 bertambah sebesar Rp. 1.003.958.714,00 Dibanding dengan saldo tahun 2019 sebesar Rp. 19.725.382.865,00.

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 46.636.201.803,00 meningkat sebesar Rp. 679.154.970,00 dibandingkan saldo TA 2019 sebesar Rp. 45.957.046.833,00.

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan *dan* Irigasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 14.612.677.426,00 bertambah sebesar Rp. 4.014.549.223,00 dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 10.598.128.203,00.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 340.395.000,- tidak terdapat penambahan dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 340.395.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (26.308.797.770,00) sedangkan tahun 2019 adalah sebesar Rp. (23.006.522.342,00)

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
3.	**Aset Lainnya**	**Rp. 57.251.435,00**	**Rp. 0,00**

a. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 57.251.435,00.

b. Aset Lain-Lain

Aset lain lain merupakan aset yang rusak berat dan akan dihapus. Saldo Aset lain lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.082.020.000,00.

c. Akumulasi Penyusutan Aset Lain- Lain

Akumulasi penyusutan aset lain lain sebesar Rp (28.625.717,00)

II. KEWAJIBAN

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	**KEWAJIBAN**	**Rp. 131.072.834,00**	**Rp. 189.503.239,00**

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 131.072.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan Diterima dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 120.000.000,- yang diperoleh dari retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa ruko untuk indomaret di terminal adiwerna) selama 5 tahun sebesar Rp 300.000.000,- yang telah berjalan selama dua (3) tahun sehingga berkurang sebesar Rp. 180.000.000,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari retribusi Pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah dan bangunan) yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

b) Utang Beban

Nilai Utang Beban kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 adalah Rp. 11.072.834,- dan 2019 adalah sebesar Rp. 9.503.239,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Beban per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	2019	2018
BEBAN TELEPON	0.-	0.-
BEBAN AIR	296.000,-	199.000,-
BEBAN LISTRIK	8.754.441,-	6.203.999,-
BEBAN INTERNET	2.022.393,-	1.825.670,-
JUMLAH	**11.072.834,-**	**8.228.669,-**

III. EKUITAS DANA

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1. Ekuitas Dana	**Rp. 62.761.160.851,50**	**Rp. 56.834.094.632,25**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas TA. 2020 sebesar Rp. 62.761.160.851,50 naik sebesar Rp. 5.927.066.219,25,- dibandingkan TA 2019 sebesar Rp. 56.834.094.632,25 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 2.213.415.603,- dan Rp 2.626.809.528,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengolahan limbah cair, Retribusi Pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir.

2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.184.805.176,- dan Rp. 8.644.419.567,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.267.824.281,- dan Rp. 19.144.522.455,-. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

4. Beban Hibah

Jumlah beban hibah tahun 2020 adalah Rp. 154.000.000,- sedangkan th. 2019 adalah sebesar Rp. 0,-

5. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.316.588.278,75 dan Rp. 3.531.554.194,75. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

6. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah Rp. 119.765.070,- dan Rp. 241.157.073,50 .

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 56.834.094.632,25 Rp. 37.217.534.682,50

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 18.762.712.550,75 Rp. (28.934.843.762,25) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 62.761.160.851,50 dan Rp. 56.834.094.632,25,-.

F. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

F.1. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan kabupaten Tegal merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Tegal Urusan Wajib Perhubungan merupakan urusan yang berkaitan dengan memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Urusan perhubungan selalu berkaitan dengan transportasi dan memiliki fungsi sebagai sektor penunjang pembangunan serta pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jasa perhubungan merupakan input dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Pentingnya urusan ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas manusia serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air bahkan dari dan ke luar negeri.

Dinas Perhubungan kabupaten Tegal mempunyai personil sejumlah 55 orang PNS, 1 orang PTT, 250 orang PHL.

F.2 Struktur Organisasi Tahun 2020

Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal antara lain:

- Kepala Dinas	:	Drs. AKHMAD UWES QORONI. MT
- Plt. Sekretaris	:	Dra. SUMIYATI, MM
- Kepala Bidang Lalu Lintas	:	TEGUH SUGIARTO, SH
- Kepala Bidang Keselamatan	:	SUPRAPTO, SE, M.SI
- Kepala Bidang Angkutan	:	Dra. SUMIYATI, MM
- Kasubag Umum dan Kepegawaian	:	MOHAMAD KHALIMI, SH
- Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	:	Dra.ENDANG MARHAENI
- Kasubid / Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	:	SUWONDO, S,IP
- Kasubid / Kasi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas Dan Perparkiran	:	BAYU ATMOWIYANTO, S.ST
- Kasubid / Kasi Angkutan Jalan dan Terminal	:	SUBUH SUMARYONO,S.IP
- Kasubid / Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	:	WIDODO TRIONO
- Kasubid / Kasi Penerangan Jalan Umum	:	DIDI HENDRATNO, S.IP
- Kasubid / Kasi Keselamatan	:	MUHAJIR,S.IP

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2 . 09	Perhubungan
Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01	Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	56.834.094.632,25	37.217.534.682,50
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.762.712.550,75)	(28.934.843.762,25)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas Kas	0,00	0,00
Koreksi Piutang	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang	66.515.011,00	35.966.826,00
Koreksi Aset Tetap	0,00	197.787.941,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8,00)	(1.148.253.217,00)
Koreksi Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Koreksi Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD	0,00	(512.211.803,00)
Koreksi Ekuitas Mutasi Persediaan SKPD	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	9.000.000,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	24.614.263.767,00	49.978.113.965,00
EKUITAS AKHIR	62.761.160.851,50	56.834.094.632,25

Slawi, 31 Desember 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERHUBUNGAN

Drs. AKHMAD UWES QORONI, M.T
NIP. 19740621 199302 1 001

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2 . 09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01	Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	267.000,00	48.665.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	768.420.425,00	657.962.957,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(648.655.355,00)	(595.405.296,00)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	4.026.032.860,00	595.946.075,00
JUMLAH ASET LANCAR	4.146.064.930,00	707.168.736,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	2.659.060.000,00	2.659.060.000,00
Peralatan dan Mesin	20.729.341.579,00	19.725.382.865,00
Gedung dan Bangunan	46.636.201.803,00	45.957.046.833,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.612.677.426,00	10.598.128.203,00
Aset Tetap Lainnya	340.395.000,00	340.395.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(26.308.797.770,00)	(23.006.522.342,00)
JUMLAH ASET TETAP	58.668.878.038,00	56.273.490.559,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	57.251.435,00	57.251.435,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(28.625.717,50)	(14.312.858,75)
Aset Lain-lain	3.082.020.000,00	3.082.020.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(3.082.020.000,00)	(3.082.020.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	28.625.717,50	42.938.576,25
JUMLAH ASET	**62.843.568.685,50**	**57.023.597.871,25**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	120.000.000,00	180.000.000,00

Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Unit Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

URAIAN	2020	2019
Utang Beban	11.072.834,00	9.503.239,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	131.072.834,00	189.503.239,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	**131.072.834,00**	**189.503.239,00**
EKUITAS		
EKUITAS	62.761.160.851,50	56.834.094.632,25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**62.892.233.685,50**	**57.023.597.871,25**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2 . 09	Perhubungan
Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01	Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	**PENDAPATAN - LRA**	2.265.022.300,00	2.042.958.135,00	90,20	2.507.436.857,00
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	2.265.022.300,00	2.042.958.135,00	90,20	2.507.436.857,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.265.022.300,00	2.041.958.135,00	90,15	2.507.436.857,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	**BELANJA**	29.907.386.000,00	26.656.954.902,00	89,13	52.446.530.322,00
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	23.178.318.000,00	21.178.886.995,00	91,37	13.832.894.693,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.726.853.000,00	9.184.805.176,00	94,43	8.644.419.567,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.451.465.000,00	11.994.081.819,00	89,17	5.188.475.126,00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	6.729.068.000,00	5.478.067.907,00	81,41	38.613.635.629,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.000.000,00	133.794.300,00	98,38	277.948.804,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.543.068.000,00	1.511.334.474,00	97,94	6.315.141.342,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.050.000.000,00	3.832.939.133,00	75,90	32.020.545.483,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.642.363.700,00)	(24.613.996.767,00)	89,04	(49.939.093.465,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.642.363.700,00)	(24.613.996.767,00)	89,04	(49.939.093.465,00)

Slawi, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERHUBUNGAN TEGAL

Drs. AKHMAD UWES QORONI, M.T

NIP. 19740621 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2 . 09	Perhubungan
Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01	Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	**PENDAPATAN - LO**	2.280.270.255,00	2.626.809.528,00	(346.539.273,00)	(13,19)
8 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	2.213.415.603,00	2.626.809.528,00	(413.393.925,00)	(15,74)
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.213.415.603,00	2.626.809.528,00	(413.393.925,00)	(15,74)
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	66.854.652,00	0,00	66.854.652,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	66.854.652,00	0,00	66.854.652,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**BEBAN**	21.042.982.805,75	31.561.653.290,25	(10.518.670.484,50)	(33,33)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	9.184.805.176,00	8.644.419.567,00	540.385.609,00	6,25
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	8.267.824.281,00	19.144.522.455,00	(10.876.698.174,00)	(56,81)
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.316.588.278,75	3.531.554.194,75	(214.965.916,00)	(6,09)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	119.765.070,00	241.157.073,50	(121.392.003,50)	(50,34)
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2 . 09	Perhubungan
Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01	Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(18.762.712.550,75)	(28.934.843.762,25)	10.172.131.211,50	(35,16)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18.762.712.550,75)	(28.934.843.762,25)	10.172.131.211,50	(35,16)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.762.712.550,75)	(28.934.843.762,25)	10.172.131.211,50	(35,16)

Slawi, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PERHUBUNGAN

Drs. AKHMAD UWES QORONI, M.T

NIP. 19740621 199302 1 001